



ANAK BUAH POLAH, KEMENKEU KEPRADAH

13 Ribu Pegawai Belum Laporkan Harta, KPK Turun Tangan soal Rafael

Sungguh miris melihat awal mula kegaduhan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang kini tengah menjadi sorotan rakyat. Dimulai dari seorang anak laki-laki bernama Mario Dandy Satriyo yang menganiaya pemuda bernama David hingga koma. Perkara makin melebar saat diketahui korban bernama David adalah putra petinggi GP Ansur, Jonathan Latumahina. Tak berhenti disitu, Mario yang saat ini sudah berstatus tersangka ternyata merupakan anak Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo. Jejak digital Mario pun langsung ramai di media sosial sebagai pemuda yang suka pamer harta. Konten mobil Jeep Rubicon--salah satu barang bukti penganiayaan--dan motor Harley Davidson bersliweran di akun TikTok-nya. Saat ditelusuri lebih dalam ternyata dua kendaraan itu tak tercatat di laporan yang diberikan ke KPK. Kondisi makin runyah, saat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sang bapak, Rafael diketahui sangat fantastis sebesar Rp 56 miliar di laporan tahun 2021. Riak pun menciptakan gelombang yang menghantam Kemenkeu secara lebih luas dan besar. Saat laman elhkn.kpk.go.id dibuka ternyata 13.885 orang (43,13 persen) pejabat belum lapor kekayaannya sampai 2022. Berdasarkan data terdapat 32.191 orang pejabat Kemenkeu yang menjadi wajib lapor. Dari jumlah tersebut, baru 18.306 (56,87 persen) yang sudah melaporkan harta kekayaannya. Bagai peribahasa: Anak buah polah, Kemenkeu kepradah (Pegawai bertindak tidak baik, Kemenkeu kena dampak, Red). Duh!

(Baca Hal 11)

LHKPN

Kemenkeu 2022

Data LHKPN Pegawai Kemenkeu per 23 Februari 2023

FILTER

Laporan

Pelaporan LHKPN Tahun

2022

Jenis Laporan

(All)

Instansi dan Jabatan

Tingkat Bidang

Pusat EKSEKUTIF

Eselon Status UU

(All) (All)

Provinsi

(All)

Nama Instansi

KEMENTERIAN KEUANGAN

PELAPORAN

50.36%

(12,352 / 24,526)

Sudah Lapor

12,352
(50.3629%)

Belum Lapor

12,174
(49.6371%)

KEPATUHAN

37.40%

(9,172 / 24,526)

9,172
(37.40%)

15,354
(62.60%)

Government (Hal.2)
Penghapusan
Honorer Berlaku
November 2023!!

Kepatuhan dihitung dari jumlah status pelaporan LHKPN Lengkap dibagi seluruh Wajib Lapor

Penghapusan Honorer Berlaku November 2023 Presiden Beri Perintah Khusus ke MenPAN-RB



(Ilustrasi) Penghapusan tenaga honorer yang ditargetkan dimulai November 2023 ini masih menjadi pro-kontra. (dok.ist)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perintah khusus kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrat (Menpan-RB) Azwar Anas untuk segera membereskan masalah karyawan honorer. Apalagi jumlah karyawan honorer jumlahnya sangat membludak di instansi-instansi pemerintahan.

Titah ini diberikan Jokowi setelah mendapatkan laporan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) soal nasib karyawan honorer. Saat ini menurutnya Kemenpan-RB sedang menyiapkan jalan tengah terbaik bagi masalah pekerja honorer di instansi pemerintah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada jalan tengah terkait rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023. Sebab kata Jokowi, saat ini masih banyak tenaga honorer yang bekerja di kantor-kantor pemerintah daerah (Pemda). "Tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik. Karena ada yang masih di provinsi itu masih ribuan, di kabupaten/kota itu ratusan (tenaga honorer). Angka-angka yang perlu kita pikirkan

bersama," ujarnya dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Balikpapan, Kamis (23/2/2023).

"Itu yang masih dirumuskan untuk dicarikan jalan tengahnya. Tadi pagi, saya minta kepada Menpan-RB, tolong kalau nanti sudah diputuskan, bisa kita laksanakan bersama-sama," sambungnya.

Jokowi mengaku mendapatkan pertanyaan seputar masalah penghapusan tenaga honorer dari APPSI. Oleh karena itu, Jokowi langsung meminta penjelasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas. "Kemarin, Pak Ketua APPSI menanyakan mengenai urusan tenaga honorer yang di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota masih banyak. Tadi pagi, saya by phone ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok," kata dia.

Di Rakernas tersebut, Jokowi menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Saat itu, ia mengaku melakukan penghentian rekrutmen tenaga honorer. Namun kini, tenaga honorer tersebut justru kembali ada. "Tetapi, saat saya masih wali kota (Solo), itu

sebetulnya sudah seratus persen disetop. Tapi enggak tahu kok muncul lagi? Bisa ribuan lagi," ucap Jokowi.

Seperti diketahui, pemerintah akan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan. Namun jumlah tenaga honorer di daerah masih sangat banyak. Padahal aturan itu akan diterapkan mulai 28 November 2023. Hal itu tertulis dalam Surat Edaran yang diterbitkan KemenPAN RB, saat masih dipimpin oleh almarhum Tjahjo Kumolo.

Adapun latar belakang diterbitkannya SE itu adalah berupa pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal tersebut berisi pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Selanjutnya pasal 8 UU yang sama menyebutkan, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Cari Opsi Bersama Pemda

Pemerintah saat ini tengah menggodok skenario terbaik dalam menindaklanjuti kebijakan penghapusan tenaga non ASN alias honorer. Menteri Anas mengatakan, sebenarnya per 2018, sisa Tenaga Honorer hanya sekitar 444.687 orang, yang disebut sebagai Tenaga Honorer Kategori II/THK 2. Jumlah itulah yang menurutnya seharusnya dituntaskan penataannya.

Sebab, kata Anas, sejak 2018 semua instansi pemerintah dilarang lagi mengangkat tenaga Non-ASN dan diberi waktu paling lama 5 tahun untuk menyelesaikan penataannya, sampai dengan November 2023. Namun, karena berbagai dinamika dan kebutuhan pelayanan, pengangkatan tenaga non-ASN masih dilakukan.

"Pada sisi lain, memang tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga honorer sangat membantu dalam

penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan," ujar Anas.

Anas menjelaskan, berdasarkan pendataan dan validasi data jumlah tenaga non-ASN terbaru, totalnya mencapai 2,3 juta sebagai data dasar Tenaga Non-ASN. Namun dari jumlah tersebut, menurut dia, hanya 1,8 juta yang diiringi surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dari pejabat pembina kepegawaiannya termasuk kepala daerah.

"Saat ini, Kementerian PANRB secara maraton telah bertemu dengan Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), dan APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) untuk mencari opsi terbaik bagi penataan tenaga non-ASN. Jadi pemerintah pusat tidak mau seenaknya sendiri, tapi kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN," ujarnya.

"Bahkan besok saya ke Kalimantan Timur untuk bertemu para gubernur di dalam APPSI guna membahas tenaga non-ASN ini," imbuh Anas.

Selain itu, lanjut Anas, Kementerian PAN-RB berkonsultasi dan mendapat banyak masukan dari komisi terkait di DPR dan DPD. "Kami juga telah dan terus konsultasi dengan teman-teman di DPR maupun DPD, karena beliau-beliau juga punya concern terhadap masalah ini," ujar Anas.

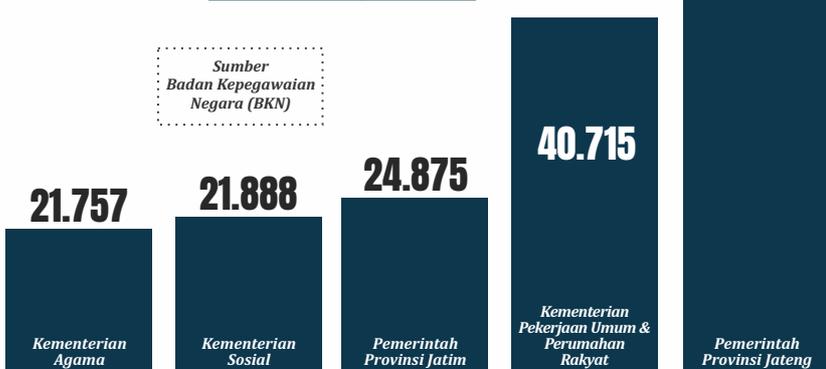
Anas memaparkan, terdapat sejumlah opsi yang saat ini masih diperdalam. "Semua opsi tersebut sudah kami bedah analisisnya, mulai dari analisis strategis, keuangan, hingga operasional," ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut. "Semua pembahasan opsi-opsi maupun alternatif kebijakan yang ada akan kami laporkan kepada Bapak Presiden," tutur Anas. (wid,rls, ant/dya)

TOP 5 INSTANSI DENGAN JUMLAH NON-ASN TERBANYAK

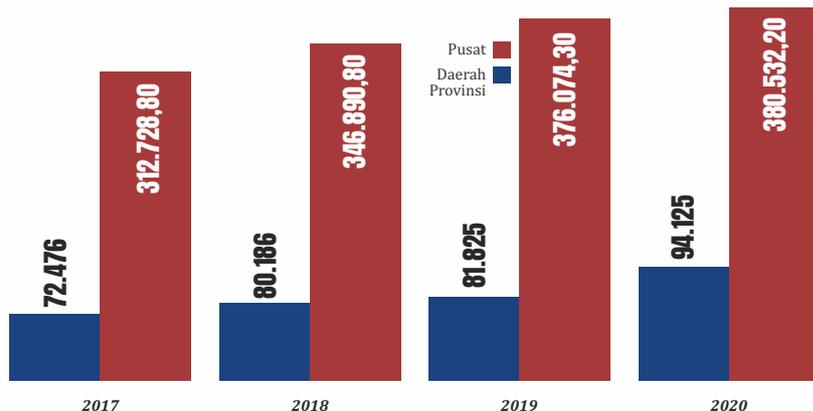
Berdasar Hasil Pendataan Non-ASN Tahap Prafinalisasi

Data BKN Per 30 September 2022

Sumber
Badan Kepegawaian
Negara (BKN)



BELANJA PEGAWAI PUSAT DAN DAERAH PROVINSI (MILIAR RUPIAH) 2017-2020



Catatan untuk Calon Gubernur BI dari DPR RI

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengusulkan nama Perry Warjiyo untuk kembali menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Usulan tersebut secara resmi telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Berbagai catatan penting pun diberikan para wakil rakyat, agar Indonesia stabil di tengah pergolakan ekonomi global.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, Gubernur BI memiliki tugas penting karena mengemudikan bank sentral yang memiliki peran strategis. Pertama, BI bertugas memastikan tingkat inflasi terkendali agar stabilitas ekonomi nasional tetap seimbang. "Inflasi ini menjadi urusan sangat penting, inflasi tinggi bisa menjadi malapetaka bagi sebuah pemerintahan, sebab berpengaruh langsung bagi hajat hidup rakyat banyak," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/2/2023).

Kedua, BI juga harus memastikan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama global, khususnya dollar Amerika Serikat (AS) agar kondisi pasar keuangan terjaga. "Oleh sebab itu, kemampuan mengorganisir dan membuat keputusan tepat dalam melakukan berbagai operasi pasar yang dijalankan oleh BI, dalam rangka pengendalian inflasi dan nilai tukar sangat penting," ucapnya.

Ketiga, BI bertanggung jawab untuk memastikan inklusi keuangan berjalan dengan baik. Kemudian juga memastikan berbagai transaksi keuangan dan sistem pembayaran berjalan dengan baik, aman, dan cepat. "BI juga berwenang mengelola lalu lintas devisa, dan cadangan devisa negara," kata Said.

Untuk menjalankan tugas-tugas itu, Said membeberkan beberapa catatan untuk dilakukan Gubernur BI baru ke depan. Menurutnya, Gubernur BI harus dapat berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang tergabung dalam Komite Stabilitas

Sistem Keuangan (KSSK). Selain Gubernur BI, KSSK beranggotakan Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Syarat ini penting sebab saat ini dan kedepan kita menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah. Ekonomi global diprediksikan masih sulit, kita di dalam negeri juga menghadapi tahun politik," ucapnya.

Namun karena selama lima tahun ke belakang Perry Warjiyo sudah menjabat Gubernur BI, maka dia melihat chemistry ini sudah terbangun dengan para anggota KSSK. "Peran ini telah dijalankan dengan baik oleh Gubernur BI saat ini," kata Said.

Gubernur BI baru juga harus memiliki sikap yang sigap dan tanggap dalam menghadapi berbagai tantangan baru yang tidak terduga. Misalnya seperti saat menghadapi pandemi Covid-19, BI dapat membantu pemerintah menghadapi tahun yang sulit dengan menerapkan kebijakan berbagi beban (burden sharing) melalui penyerapan surat berharga negara (SBN) melalui private placement. "BI saat itu sangat membantu posisi APBN aman akan kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Gubernur BI saat ini juga telah membuktikannya," jelasnya.

Said menyebut, tugas penting lainnya bagi Gubernur BI adalah memastikan kelanjutan pengaturan tentang lalu lintas dan cadangan devisa negara. Menurutnya, pengaturan tentang lalu lintas devisa diperlukan untuk memastikan devisa negara memiliki dampak multipler pada ekonomi nasional. Agenda inilah yang perlu diperkuat ke depan.

Tidak hanya dengan anggota KSSK, Gubernur BI baru juga harus bisa membangun hubungan baik dengan DPR RI, terutama kepada Pimpinan, Banggar, dan Komisi XI DPR RI. Kemampuan ini, kata dia, dibutuhkan oleh Gubernur BI agar dalam



menjalankan tugas-tugas strategis BI secara teknokrasi juga mendapatkan dukungan politik yang kuat dari DPR.

Hal yang perlu dipertimbangkan lainnya, sosok Gubernur BI haruslah yang memiliki jaringan internasional. Pasalnya, hal ini akan menambah kepercayaan pasar, khususnya investor internasional terhadap pasar keuangan Indonesia. Menurutnya, kepercayaan ini sangat penting untuk dibangun karena pasar keuangan RI masih belum dalam. "Sosok Gubernur BI yang diakui secara internasional akan mendorong capital inflow untuk menguatkan pasar keuangan kita. Agenda ini perlu diperkuat oleh Gubernur BI ke depan," tukasnya.

Dikritisi, Harusnya Sosok Fresh

Terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan sebenarnya BI butuh penyegaran. "Jadi sebaiknya dilanjutkan oleh sosok yang fresh dan memiliki visi moneter progresif," ujar Bhima.

Sejauh ini, dia menilai, kebijakan Perry Warjiyo masih mengekor pada kenaikan Fed Fund Rate. Gubernur BI saat itu juga menurut dia, terbukti lambat untuk lakukan implementasi devisa wajib ditanam di dalam negeri. Selain itu model kebijakan moneter terlalu tunduk pada eksekutif seperti kasus burden sharing.

Sehingga, menurut Bhima, BI perlu sosok yang tegas bahwa independensi BI tidak bisa diatur oleh intervensi eksekutif. Selain itu, perlu ada sosok yang berani menghentikan kegiatan cetak uang melalui pembelian SBN di pasar primer karena berdampak buruk ke inflasi dan menjadi beban BI jangka panjang.

"Masih banyak internal BI yang punya visi dan keberanian terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi pasca pandemi Covid-19," ucap Bhima.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan alasan mengapa Perry

diusulkan kembali sebagai Gubernur BI. Salah satunya, Perry dinilai punya jam terbang dan pengalaman memadai dalam menjalankan tugasnya. "Karena gini, jadi dalam situasi kegentingan global seperti ini, kita tidak ingin mengambil resiko fiskal moneter. Itu menjadi sangat-sangat penting," kata Jokowi. "Dan kita harus menempatkan orang-orang yang memiliki jam terbang yang tinggi, memiliki pengalaman yang tinggi," ujarnya melanjutkan.

Usulan Jokowi tersebut otomatis membuat Perry menjadi calon tunggal Gubernur BI. Jika DPR RI menyetujui Perry untuk menjadi Gubernur BI, maka periode 2023-2028 akan menjadi periode kedua Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menjadi Gubernur BI setelah pada 2018 dicalonkan Jokowi ke DPR RI untuk menggantikan Agus Martowardojo. (wid,rls,ist/dya)

KARIR PERRY WARJIYO

- 1998 Kepala Biro Gubernur
- 2003 Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan
- 2007 Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF)
- 2009 Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia
- 2013 Deputi Gubernur Bank Indonesia
- 2018-2023 Gubernur Bank Indonesia



JUMLAH HARTA KEKAYAAN GUBERNUR BANK INDONESIA PERRY WARJIYO BERDASARKAN LHKPN (2022)



Wagub Emil : Pusat Ekonomi Asia Tenggara Akan Ada di Jatim

SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut pusat ekonomi Asia Tenggara ada di Jawa Timur sehingga menjadi primadona untuk berinvestasi.

Menurut dia, Jawa Timur adalah penyumbang ekonomi terbesar kedua setelah DKI Jakarta, jumlah kontribusinya sekitar seperenam perekonomian Indonesia dari 38 provinsi.

"Padahal secara jumlah penduduk, Jatim hanya terbesar kedua setelah Jawa Barat," ujarnya di Surabaya, Kamis.

Emil Dardak menyampaikan saat hadir pada kongres Asean Mayor Forum 2022 beberapa waktu lalu, bahwa dihitung-hitung hampir setengah ekonomi ASEAN ada di Indonesia dan Jawa Timur hampir menyumbang nyaris 7 persen perekonomian ASEAN.

"Sumbangsih Jatim kepada ASEAN ini disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi pascapandemi

COVID-19," ucap orang nomor dua di Pemprov Jatim tersebut.

Mantan Bupati Trenggalek tersebut mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami kontraksi sehingga lebih rendah dari rata-rata nasional di angka -2,33.

Sedangkan, pada tahun 2021 berada pada 3,56. Namun pada 2022 mengalami peningkatan sehingga berada di atas nasional dengan angka 5,34.

"Pertumbuhan ekonomi kita sempat mengalami kontraksi di tahun 2020, tapi perlahan melalui upaya pemulihan ekonomi nasional mampu tumbuh di atas rata-rata nasional menjadi 5,34 di tahun 2022," katanya.

Melihat angka pertumbuhan ekonomi dan menurunnya inflasi di Indonesia, Emil Dardak menilai bahwa peluang untuk terjadinya resesi sangat kecil atau kurang lebih hanya 2 persen.

Apalagi, lanjut dia, data yang

dikutip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan tren pertumbuhan 5 tahunan investasi di Jawa Timur yang menggembirakan.

Peningkatan signifikan terjadi di tahun 2022 sebesar 38,8 persen dibanding tahun 2021. Sedangkan, realisasi penanaman modal asing meningkat sebesar 66,7 persen dan modal dalam negeri meningkat 24,5 persen.

"Ini karena di antara negara-negara Asia Tenggara, Jawa Timur sudah menjadi salah satu primadona investasi. Contohnya, Singapura berkontribusi sebesar 15,1 persen dengan realisasi Rp1,70 triliun di Jatim. Kami memberikan banyak kemudahan untuk para investor dan stakeholder," tuturnya.

Selain itu, BPS juga mencatatkan angka inflasi Indonesia per Januari 2023 sekarang berada di rentang terkendali.

Inflasi pada Januari 2023 mengalami penurunan menjadi 5,28



Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat memberikan keterangan pers di Surabaya. (Antara)

persen (YoY), yang sebelumnya pada Desember 2022 ada di angka 5,51 persen (YoY).

Dari angka tersebut, Indonesia dan Jatim memiliki kesempatan untuk bangkit dan terhindar dari inflasi serta resesi. (lut/dya)

Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut Butuh Kolaborasi Multipihak

SURABAYA - Seminar Nasional Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut mengungkap bahwa dibutuhkan peran banyak pihak untuk merawat ruang pesisir dan laut. Apalagi peraturan-peraturan pada sektor ini sangat kompleks.

Seminar yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Acara yang sekaligus menjadi kick off peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Jawa Timur 2023 ini diadakan di Hotel Platinum, Jalan Tunjungan, Surabaya, Kamis (16/02/2023).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang ikut hadir mengapresiasi PWI Jawa Timur yang menggelar seminar ini. Pasalnya, materi seminar ini amat penting bagi semua pihak. "Saya support PWI Jawa Timur di acara ini," ungkapnya.

Plt Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Suharyanto yang mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono membacakan makalah dalam seminar ini.

Sedangkan Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar, Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Permana Yudianto, mengatakan butuh kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha.



PWI Jatim memberikan penghargaan pada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

"Kolaborasi sangat penting karena pemanfaatan ruang laut mencakup permukaan, kolom, dan dasar laut," ujarnya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur, M Isa Anshori, mengatakan ekspor perikanan dari Jawa Timur tertinggi di Indonesia. Bahkan mereka yang menangkap ikan di Laut Arafuru, bongkarnya tetap di Jawa Timur.

"Ke depan menangkap ikan itu akan kena pajak. Kalau nggak salah tahun ini sudah ada dan masuk dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)," kata Isa Anshori.

Diakui sektor penangkapan ikan sempat anjlok Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)-nya selama

pandemi. Namun saat ini sudah bergansur pulih karena nilai tukar nelayan sudah mulai tinggi mencapai 103,75.

Ada beberapa isu strategis kebijakan pembangunan maritim. Di antaranya illegal fishing, rendahnya kesadaran masyarakat atas perundangan, tumpang tindih pemanfaatan ruang laut, serta perubahan iklim global.

Sementara, Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi, mengatakan potensi migas di Indonesia cukup besar karena ada 128 cekungan. Dari jumlah itu ada 68 cekungan yang belum dieksplorasi. "Nantinya memang pemanfaatan



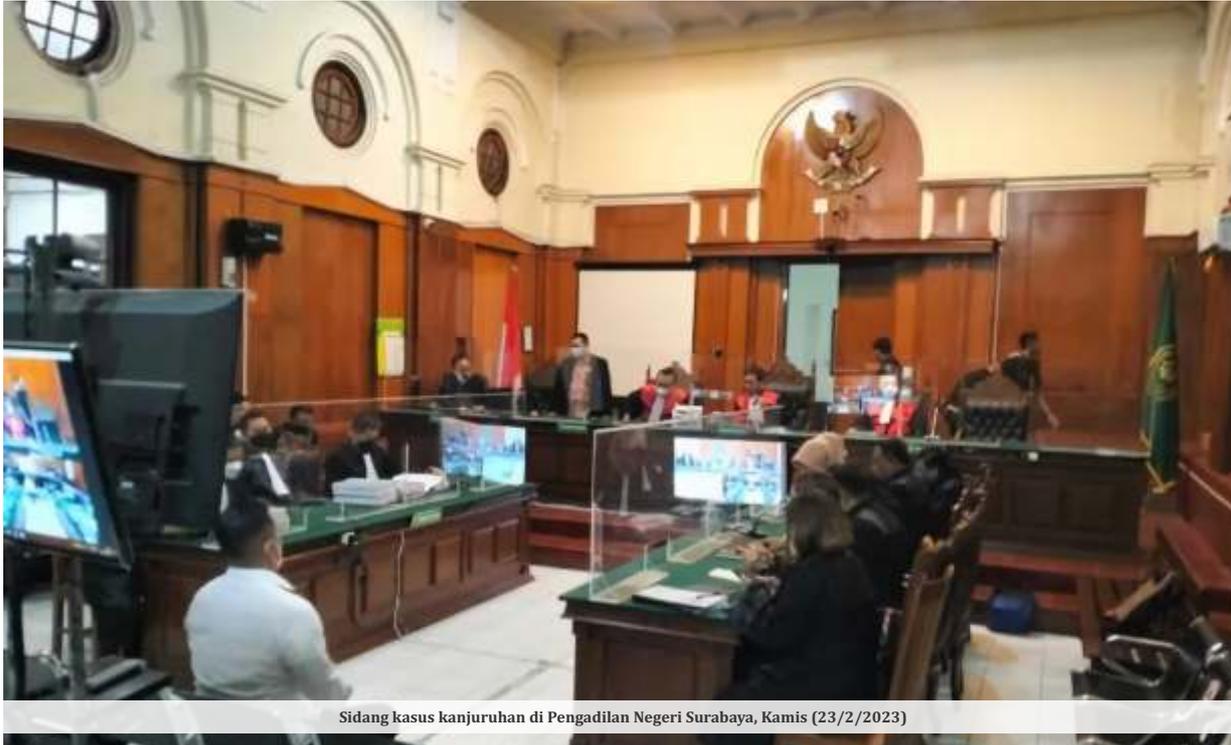
Suasana Seminar Nasional Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut yang digelar PWI Jatim pada Kamis (16/2/2023) lalu.

energi fosil akan berkurang, sedangkan energi baru terbarukan (EBT) akan bertambah porsinya," katanya.

Akademisi ITS Daniel M Rosyid melihat undang-undang saja masih jauh dari cukup untuk mengatur ruang pesisir dan laut. Yang lebih penting adalah organisasi dan sumber daya.

Acara ini juga ditandai dengan Deklarasi Laut Bersih yang melibatkan 14 stakeholder yang memanfaatkan ruang pesisir dan laut. Kemudian dilakukan penanaman nama titik terumbu karang. Yang mengejutkan di akhir acara ada tumpeng untuk memperingati HPN 2023 yang dimakan bersama-sama oleh para peserta seminar. (ist/lut)

Tiga Terdakwa Tragedi Kanjuruhan dari Unsur Polisi Dituntut Tiga Tahun Penjara



Sidang kasus kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (23/2/2023)

SURABAYA - Tiga orang terdakwa tragedi Kanjuruhan, Malang, dari unsur kepolisian dituntut hukuman tiga tahun kurungan penjara dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (23/2/2023).

Tiga orang terdakwa itu masing-masing Wahyu Setyo Pranoto (Mantan Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Malang), Bambang Sidik Achmadi (Mantan Kepala Satuan Samapta Kepolisian Resor Malang), Hasdarmawan (Mantan Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim).

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Wahyu Setyo Pranoto (Bambang Sidik Achmadi-Hasdarmawan) selama tiga tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata JPU Bambang saat membacakan tuntutan dalam berkas terpisah.

Terdakwa didakwa Kesatu Pasal 359 KUHP dan Kedua Pasal 360 ayat (1) KUHP dan Ketiga Pasal 360 ayat (2) KUHP.

"Berdasarkan keterangan saksi saksi, surat, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa maka seluruh unsur dalam dakwaan pertama (kesatu dan kedua dan ketiga) telah terbukti seluruhnya. Oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya," katanya.

Jaksa Penuntut umum juga mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan tuntutan pidana yang memberatkan yaitu terdakwa karena kelalaiannya memerintahkan anggotanya untuk melakukan

penembakan gas air mata di dalam stadion terkait pengamanan pertandingan antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya.

"Sedangkan, hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa melaksanakan tugas dan perintah jabatan dalam melakukan pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema FC dan Persebaya tetapi terdapat kelalaian karena melaksanakan tugas tidak sesuai standar operasional prosedur pengamanan," katanya.

Selain itu, kata jaksa, terdakwa sudah mendarmabaktikan jiwa dan raga untuk NKRI berdinasti di Kepolisian RI. Terdakwa kooperatif selama proses penyidikan dan penuntutan serta terdakwa berterus terang selama proses persidangan.

"Terdakwa selama berkarir di kepolisian berkelakuan baik dan berprestasi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga," katanya.

Ketua Majelis Hakim Abu Achmad Sidqi Amsya pun memberikan waktu selama sepekan kepada terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa untuk membuat pembelaan. Sidang pembacaan nota pembelaan itu bakal dilakukan pekan depan.

"Atas tuntutan tersebut saudara berhak mengajukan pembelaan atau pledoi. Tim penasihat hukum kami

beri waktu satu pekan, Kamis (2/3/2023)," kata Hakim.

Sebelumnya, Dua orang terdakwa kasus kerusakan di Stadion Kanjuruhan Malang, yakni Suko Sutrisno dan Abdul Haris dituntut 6 tahun 8 bulan penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Jumat (3/2/2023) malam.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suko Sutrisno selama 6 tahun 8 bulan," kata Jaksa Penuntut Umum Hari Basuki saat membacakan tuntutan.

Dalam pembacaan tuntutan yang dilakukan secara terpisah tersebut, JPU juga menuntut hukuman yang sama kepada terdakwa Abdul Haris atas tragedi sepak bola yang mengakibatkan 135 orang meninggal dunia.

Menurut JPU, kedua orang terdakwa karena kesalahan atau kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dan karena kealpaannya mengakibatkan orang lain menderita luka berat, serta karena kealpaannya mengakibatkan orang lain menderita luka-luka.

"Sehingga korban menderita dan terhalang untuk menjalankan mata pencaharian selama waktu tertentu,"

katanya.

Hari Basuki mengatakan terdakwa didakwa pertama kesatu pasal 359 KHUP dan kedua pasal 360 ayat 1 KHUP, dan ketiga pasal 360 ayat 2 KHUP atau kedua pasal 103 ayat (1) jo pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

"Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa maka seluruh unsur dalam dakwaan pertama (kesatu dan kedua dan ketiga) telah terbukti seluruhnya, oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya," ucapnya.

Ia mengatakan terdakwa terbukti melanggar tiga pasal sekaligus pasal 359 KUHP sebagaimana dimaksud pada dakwaan pertama kesatu dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun dan pasal 360 ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dakwaan pertama kedua dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun.

"Kemudian pasal 360 ayat (2) KUHP sebagaimana dimaksud pada dakwaan pertama ketiga dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan," ujarnya.

Selain itu, hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan 135 orang meninggal, 24 orang mengalami luka berat dan 623 orang luka-luka.

"Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang meninggal. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam dan berkelanjutan bagi para korban yang mengalami luka-luka dan keluarga korban. Perbuatan terdakwa menimbulkan stigma negatif terhadap persepakbolaan Indonesia," katanya.

Tragedi Kanjuruhan terjadi pada Sabtu malam, 1 Oktober 2022, usai pertandingan tuan rumah Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang berakhir dengan skor 2-3. Kekalahan itu membuat para supporter turun dan masuk ke area lapangan.

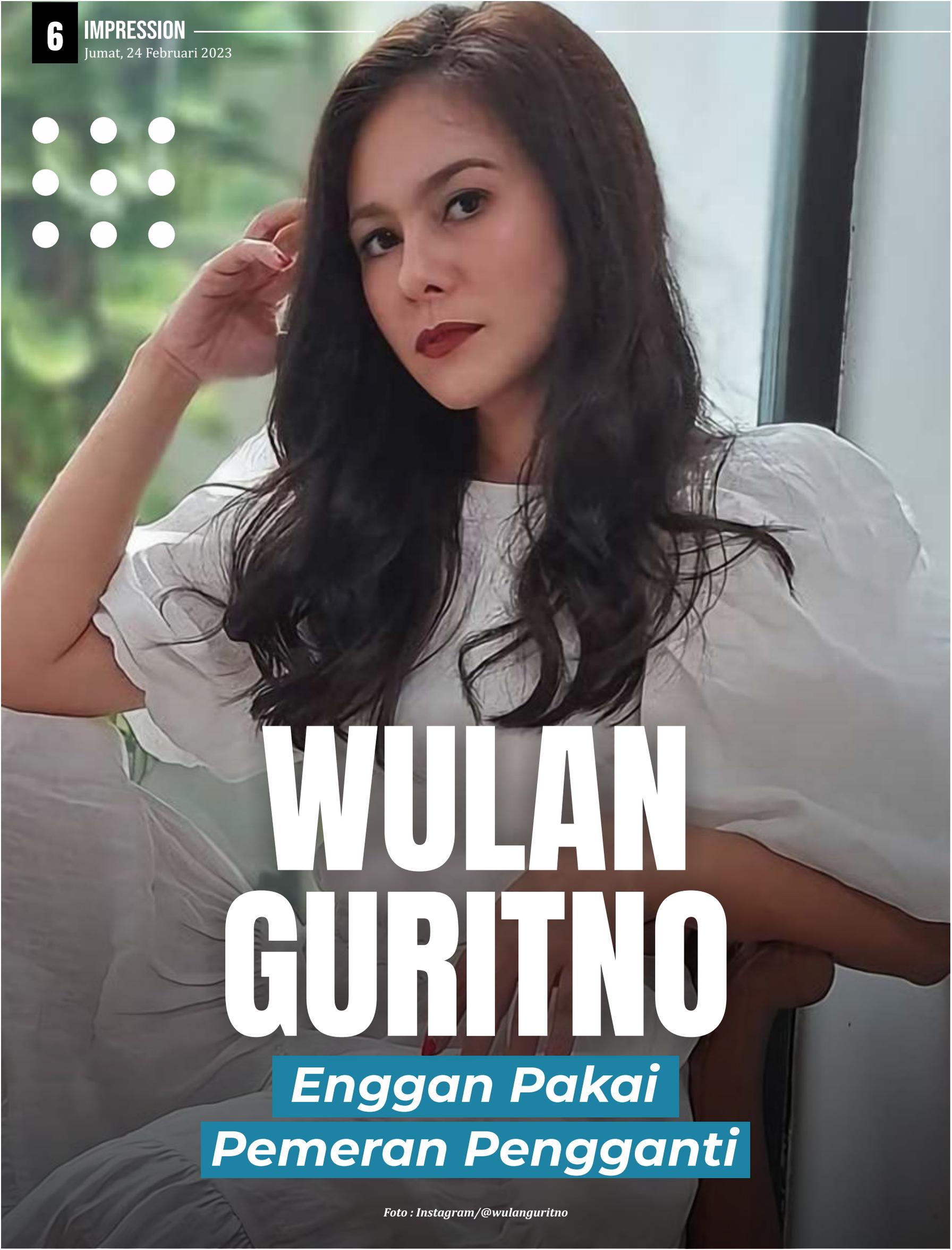
Kerusuhan tersebut semakin membesar ketika sejumlah flare (suar) dilemparkan, termasuk benda-benda lainnya. Petugas keamanan gabungan dari kepolisian dan TNI berusaha menghalau para supporter tersebut dan pada akhirnya menggunakan gas air mata yang memicu jatuhnya korban jiwa.

Kebanyakan korban meninggal akibat berdesakan dan terinjak supporter yang lainnya. Mereka berdesakan keluar dari stadion menghindari gas air mata yang diletupkan petugas keamanan. Setidaknya ada 135 korban meninggal dalam kasus ini. (lut/ant/dya)



Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Wahyu Setyo Pranoto (Bambang Sidik Achmadi-Hasdarmawan) selama tiga tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

JPU Bambang saat membacakan tuntutan dalam berkas terpisah.

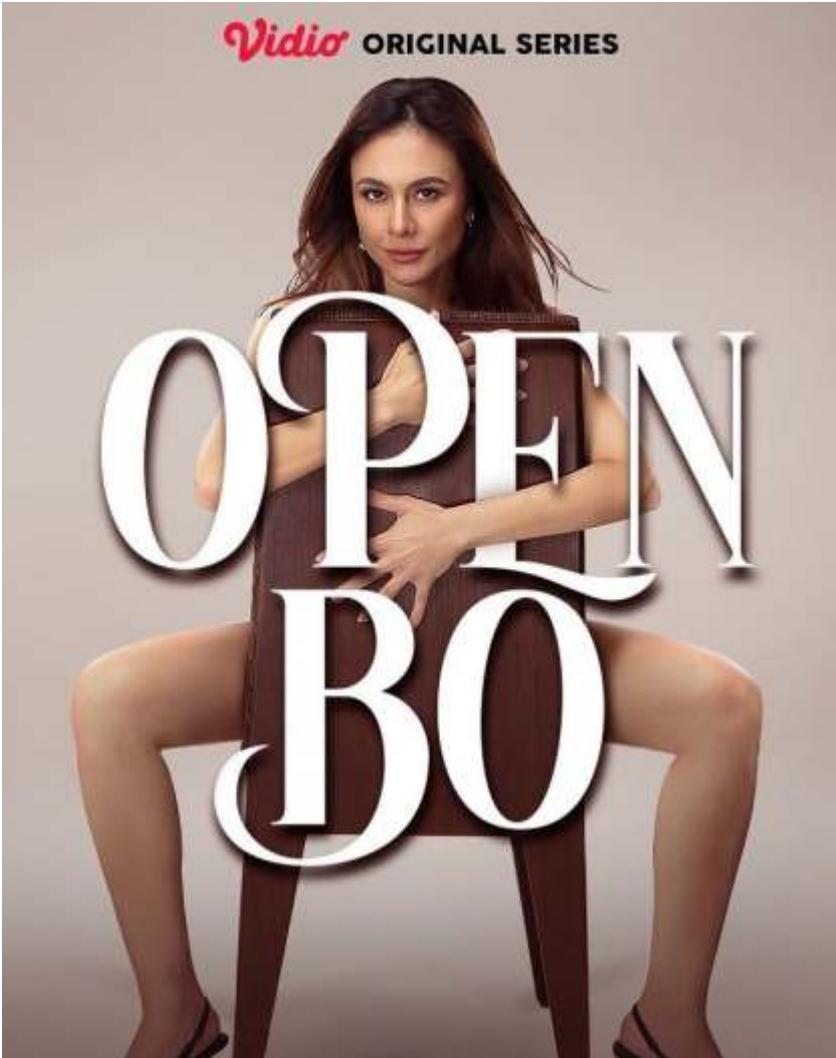


● ● ●
● ● ●
● ● ●

WULAN GURITNO

Enggan Pakai

Pemeran Pengganti



WULAN Guritno berperan menjadi wanita panggilan atau PSK (pekerja seks komersial) dalam series terbarunya berjudul Open BO.

Tentunya, web series tersebut menampilkan banyak adegan-adegan intim Wulan dengan lawan mainnya.

Memerankan satu tokoh dengan dua karakter bertolak belakang menjadi tantangan tersendiri bagi Wulan Guritno.

Itu lantaran Wulan harus menjadi wanita yang keibuan saat menjadi Ambar, tetapi berubah ganas dan sensual saat menjadi mawar.

Dalam memerankan adegan intim yang natural, Wulan mengaku harus melakukan berbagai gaya untuk membuat adegan itu terlihat nyata.

Dalam adegan seks tersebut, Wulan melakukan adegan tersebut bersama aktor Winky Wiryawan.

"Ada adegan yang walaupun trik

kamera, akrobat, dan koreo harus dengan orang yang kita nyaman," ucap Wulan Guritno beberapa waktu lalu saat konferensi pers series Open BO di Jakarta Pusat.

"Nanti tangan kamu di sini ya, gini ya, kayak akrobat, nggak ada seksi-seksinya," sambungnya lagi.

Dalam kesempatan lainnya, kekasih Sabda Ahessa itu mengaku enggan untuk memakai pemeran pengganti selama melakukan adegan intim dengan Winky Wiryawan meski dirinya sudah mencoba berbagai macam gaya.

"Eggak ada yang pakai peran pengganti," ungkap Wulan Guritno.

Bukan tanpa alasan Wulan enggan memakai pemeran pengganti, pasalnya wanita berusia 41 tahun ini sudah mengenal lawan mainnya, Winky Wiryawan. Ia merasa nyaman untuk melakukan adegan intim.

"Winky teman lama, jadi aku cukup nyaman syuting bareng," ujar Wulan.

Wulan Guritno ialah artis cantik tanah air yang berusia 40 tahun, tapi memiliki body goals.

Wulan Guritno juga sering disebut sebagai hot mama, karena di usianya yang berkepal 4, perawakannya masih seperti gadis 20 tahun.

Wanita bernama lengkap Sri Wulandari Lorraine Joko Guritno ini populer sebagai aktris, model, pengusaha, produser, dan juga presenter kenamaan.

Lahir di London, Inggris, 14 April 1980, Wulan memulai kariernya sebagai aktris di tahun 1995 silam. Ayahnya bernama Joko Guritno dan ibunya bernama Deana Battams.

Artis cantik blasteran Jawa-Inggris ini mengawali kariernya sebagai pemain sinetron dan presenter acara olahraga televisi.

Sepak terjang Wulan di dunia akting sudah berlangsung begitu lama. Di tahun 1995, ia pernah bermain dalam sinetron Pondok Indah yang disusul dengan Tutur Tinular (1997).

Selanjutnya ia juga membintangi Di Antara Dua Sisi (1998), Misteri Gunung Merapi (1998-1999).

Di tahun 1999, ia berperan sebagai Joya dalam sinetron Terpikat yang semakin melambungkan namanya. Masih di tahun yang sama, ia juga bermain dalam Elegi Dua Cinta dan Mama.

Di tahun 2000-2001, Wulan berperan sebagai Udhyani dalam Borobudur. Selanjutnya ia tampil memikat dalam Mencintaimu, Dilarang Jatuh Cinta, dan Maha Pengasih di tahun 2001. Performanya yang keren juga dapat dinikmati dalam Dua Hati Menyatu (2002), Apa Kata Hatiku (2003), dan Dari Temen Jadi Demen (2004).

Wulan pun tercatat sempat membintangi Kusebut Nama-Mu (2005), Sayangi Aisyah (2005-2006),

dan Dunia Tanpa Koma (2006). Beralih ke tahun 2007, ia kembali hadir dalam Cinta Tanpa Logika, Pangeran Betawi, dan Gara-Gara Kucing Garong.

Sementara itu, Wulan juga bermain dalam Cinta yang Sama (2013), Stereo (2015), The East (2015), dan Dunia Terbalik (2017).

Selain itu, sejumlah judul FTV pun pernah dilakoninya. Di antaranya seperti Bila Esok Tiba, Makhluq Tengah Malam (2001), Di Mana Aku di Sini (2007), Misteri Sepasang Hati, dan juga Preman Pensiun: Manusia Merdeka (2021). (berbagai sumber)



JUDUL FILM :
JAKARTA VS EVERYBOD



JUDUL FILM :
JAKARA, CITY OF DREAMER

PAKAR ORTOPEDI SARANKAN

BERJINJIT SETELAH BERDIRI 20 MENIT



Enggak usah cepet-cepet, mungkin dalam satu menit kita bisa 30 kali jinjit (setiap 20 menit),"

dr Astuti Pitarini, Sp.OT (K)

Pakar orthopaedi dan traumatologi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia



PAKAR orthopaedi dan traumatologi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia dr Astuti Pitarini, Sp.OT (K) menyarankan orang-orang berjinjit selama satu menit apabila tak bisa melakukan peregangan betis setelah berdiri selama 20 menit.

"Enggak usah cepet-cepet, mungkin dalam satu menit kita bisa 30 kali jinjit (setiap 20 menit)," ujar dia yang berpraktik di Jakarta Knee & Shoulder Orthopedic Sport Centre (JKOSC) RS Pondok Indah - Pondok Indah itu dalam sebuah diskusi bersama media di Jakarta.

Berjinjit menjadi salah satu upaya meregangkan otot betis. Setelah berjinjit, sanggah badan dengan satu kaki lalu lakukan exercise ankle atau ankle pumping yakni menggerakkan pergelangan kaki secara maksimal ke atas dan ke bawah selama satu menit. Lakukan hal serupa pada satu kaki lainnya.

Cara ini dapat dilakukan apabila seseorang samasekali tak bisa melakukan peregangan betis dan kaki saat harus berada dalam posisi statik seperti berdiri atau duduk lebih dari 20 menit.

Menurut dia, terlalu lama berdiri akan memperlambat aliran peredaran darah yang menyebabkan kekakuan otot betis sehingga memunculkan nyeri tumit.

"Dampak yang paling sering kekakuan otot betis, lama-lama proses berjalannya kurang efisien lalu akhirnya biasanya sakit atau nyeri tumit.

Nyeri tumit 80 persennya penyebabnya karena otot betis yang kaku karena kita banyak berdiri atau jalan," kata dia.

Astuti menyarankan orang-orang melakukan peregangan betis dan kaki ketimbang berdiri dengan menumpu pada satu kaki saja secara bergantian. Dia mengingatkan, sebaiknya lakukan 20 menit exercise betis dan pergelangan kaki.

"Untuk yang betis tadi jinjit 30 kali setiap 20 menit, lalu exercise ankle pumping satu menit setiap satu sisi kaki. Tujuannya supaya otot betis tidak kaku dan peredaran pembuluh darah lebih baik," tutur dia.

Namun, saat peregangan tak dapat dilakukan misalnya karena perjalanan panjang, maka seseorang perlu segera mengistirahatkan kaki sesampainya di rumah.

"Kalau punya alat bantu seperti foam roller; itu bisa dipakai untuk release otot betis. Jadi, foam roller-nya digulung-gulung di otot betis kita. Setiap satu kaki dua menit," demikian pesan Astuti.

Berdiri juga penting

Berdiri merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kebiasaan duduk terlalu lama selama bekerja.

Para peneliti dalam British Journal of Sports Medicine beberapa waktu lalu merekomendasikan kita berdiri 2-4 jam selama waktu bekerja terutama pada mereka yang banyak bekerja di belakang meja.

Kalau bisa, gunakan meja yang memungkinkan seseorang bisa berdiri

sembari bekerja.

Kendati begitu, hindarilah berdiri terlalu lama karena sama berbahayanya dengan duduk terlalu lama.

Peneliti dari University of Iowa di Iowa City menemukan bahwa para pekerja yang bekerja sambil berdiri minimal 60 menit sehari, kalorinya terbakar hingga mencapai angka 87 dibanding mereka yang tidak.

Kebiasaan ini secara signifikan sebagai cara melawan obesitas, kata peneliti.

Studi lainnya melaporkan bahwa mereka yang berdiri selama enam jam per hari bisa membantu seseorang menurunkan berat badannya seiring waktu berjalan.

Berdiri bisa membakar 0,15 kalori per menit. Dalam jangka waktu lebih panjang angka ini setara dengan 2,5 kilogram dalam setahun dan 9,99 kilogram dalam empat tahun.

Hal ini asalkan mereka tidak meningkatkan asupan makan mereka. Demikian seperti dilansir Medical News Today (Ant)



Suzuki Siap Luncurkan Ertiga Hybrid

PT SUZUKI Indomobil Sales (SIS) memajang 10 kendaraan populer mereka di Indonesia salah satunya adalah All New Ertiga Hybrid, untuk menggodanya pengunjung Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023.

4W Marketing Director PT SIS, Donny Saputra mengatakan bahwa sejak diluncurkan pada Juni 2022 lalu, All New Ertiga Hybrid sudah menjadi salah satu "tulang punggung" kendaraan Suzuki dengan membawa keunggulannya berupa teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS).

"Hadirnya All New Ertiga Hybrid sebagai LMPV unggulan Suzuki yang mewakili kendaraan elektrifikasi

dengan menggabungkan keunggulan di segi efisiensi serta segi kenyamanan yang berbiaya terjangkau bagi banyak pelanggan," kata Donny Saputra dalam keterangannya, Rabu

Donny melanjutkan, Suzuki senantiasa menunjukkan keseriusan dan komitmennya dalam berinovasi guna menghadirkan produk-produk berkualitas dan juga ramah lingkungan hingga dapat diterima oleh masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan transportasi harian.

"Itu alasan kami mengedepankan, All New Ertiga Hybrid sebagai salah satu line up utama yang wajib kami pajang di pameran otomotif bergengsi seperti IIMS kali ini," ucap Donny Saputra.

Pihaknya mengaku bahwa dipamerkannya Suzuki Ertiga Hybrid sebagai kendaraan ramah lingkungan dari Suzuki dan juga

sudah mengusung teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) pada mesin berkode K15B yang digunakan.

Donny menjelaskan bahwa teknologi SHVS akan dapat mengoptimalkan kinerja dan efisiensi dari mesin K15B melalui dua perangkat utama yang saling bekerjasama yaitu ISG (Integrated Starter Generator) dan Lithium-Ion Battery.

Tidak hanya fokus dalam memamerkan kendaraan, Suzuki juga memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mendapatkan pengetahuan lebih melalui simulasi Eco-Driving sebagai wadah edukasi mengenai teknik berkendara secara aman dan lebih efisien agar menciptakan Eco-Behavior atau situasi peduli lingkungan melalui pilihan kendaraan yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahun ini booth Suzuki berlokasi di Hall A2, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Utara. Gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, masih akan berlangsung hingga 26 Februari mendatang.

perkotaan yang mengalami kemacetan setiap hari.

Anda pastinya sudah tahu, konsumsi bahan bakar pada saat kemacetan lebih boros jika anda bandingkan saat mengemudi di jalan bebas hambatan.

Saat ini di Indonesia, mayoritas masyarakat belum ingin beralih ke mobil Hibrida karena harga jual baru mobil Hybrid lebih mahal dari pada mobil non Hybrid.

Selain itu, kesan di masyarakat akan performa mobil irit bahan yang tidak bagus untuk akselerasi dan kecepatan, sangat kuat.

Saat ini di Indonesia, mayoritas masyarakat belum ingin beralih ke mobil Hibrida karena harga jual baru mobil Hybrid lebih mahal dari pada mobil non Hybrid. Mobil Hybrid sebuah mobil yang menggabungkan mesin menggunakan bahan bakar minyak dan motor listrik bertenaga baterai. Kedua mesin dan motor listrik, saling berpadu dalam menggerakkan mobil.

Pada saat mobil bergerak lambat, maka mobil akan bergerak menggunakan motor listrik tenaga baterai dan mesin bensin akan di matikan. Jika mobil berjalan lebih cepat, mesin bensin yang akan menggerakkan mobil sambil melakukan pengisian ulang baterai.

Selain itu, saat mobil membutuhkan lebih banyak tenaga atau harus melakukan akselerasi, maka mesin hybrid dapat menggunakan daya dari motor listrik dan mesin bensin secara bersamaan untuk mendapatkan performa akselerasi maksimal. Dengan cara ini, maka konsumsi bbm akan menjadi berkurang.

Walaupun mobil Hybrid juga menggunakan mesin bensin, tapi dalam hal konsumsi bahan bakar minyak, mobil Hibrida sangat signifikan lebih irit bahan bakar di bandingkan mobil non Hybrid. Hal yang membuat mobil Hybrid irit bahan bakar, karena perpaduan kinerja mesin electric dan mesin bensin (Ant)

Awalmula mobil hybrid

Pembuatan mobil Hibrida oleh pabrikan otomotif karena munculnya isu akan pemanasan global, polusi udara dan borosnya pemakaian bahan bakar. Apalagi saat ini, bbm non subsidi terus mengalami peningkatan harga.

Lebih lanjut, pada mobil besin sebagian besar pemakaian bbm di gunakan secara sia - sia, terutama pemakaian mobil pada jalan



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI

OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)

PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARNO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANGGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,

DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, KIKI AMALIA GUYEN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

JEMBATAN KACA BROMO, KEAMANAN TERJAMIN

JEMBATAN kaca Bromo mendadak menjadi sorotan setelah beredarnya video Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terpeleset saat melewatinya pada beberapa waktu yang lalu.

Menjajal jembatan kaca tersebut, Khofifah terjatuh karena kondisi lantai yang licin akibat guyuran air hujan. Namun, Khofifah tetap memuji pembangunan jembatan kaca yang menyuguhkan pemandangan Gunung Bromo tersebut.

"Jembatan kaca ini merupakan karya putra putri anak bangsa yang dikomandani oleh Kementerian PUPR yang bisa tetap mempertahankan keindahan Gunung Bromo sekaligus tetap bisa mempertahankan daya dukung alam dan daya dukung lingkungan," ucapnya dalam

keterangan resmi.

Setelah kejadian tersebut, sang gubernur pun dinyatakan baik-baik saja tanpa cedera. Ia pun langsung melakukan aktivitas pemerintahan seperti biasa.

Untuk diketahui, jembatan kaca tersebut diberi nama Jembatan Kaca Seruni Point yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Melansir akun resmi Instagram Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, jembatan tersebut membutuhkan dana Rp 15 miliar dan menggunakan anggaran tahun 2021 dan tahun 2022.

Diklaim aman

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan bahwa jembatan kaca tersebut aman dilewati. Meskipun memang kondisinya licin karena masih ada sisa air hujan.

Di sisi lain, pihak Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur (BGTS) Kementerian PUPR telah melakukan uji beban (loading test) pada Jembatan Kaca Seruni Point.

Uji beban dilakukan dengan menggunakan beberapa instrumen untuk mendapatkan data performa struktur dan

kawat-kawat baja pada jembatan.

Salah satu instrumen yang digunakan, yaitu Total Station (TS) untuk mengukur displacement atau pergeseran titik ukur saat jembatan dilewati beban manusia.

Adapun pengetesan kekuatan kaca telah dilakukan uji laboratorium milik BGTS di Bandung, Jawa Barat.

Kaca laminated tempered yang digunakan telah diuji di laboratorium dan hasilnya diklaim sangat kuat.

Kemudian apabila terjadi kerusakan, kaca tidak akan langsung pecah berkeping-keping, namun akan berbentuk kubus-kubus kaca.

PUPR juga mengatakan bahwa jembatan kaca dilengkapi akses jalur penyelamatan sebagai antisipasi kaca yang licin dan jalur evakuasi.

Pemeliharaan jembatan akan dilakukan sementara oleh Ditjen Bina Marga dan kemudian diserahkan kepada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) selaku pengelola tempat wisata.

Diketahui, jembatan ini memiliki panjang 120 meter dengan lebar 1,8 meter dan dibangun di atas jurang berkedalaman 80 sampai 100 meter.

Jembatan ini menghubungkan kawasan wisata Seruni Point dengan shuttle area pemandangan Gunung Bromo, Gunung Batok dan Gunung Semeru.

Tergolong sebagai jembatan gantung pejalan kaki atau suspended



Sumber : Dokumentasi Humas Pemprov Jawa Timur

cable, kaca yang ada di jembatan ini terdiri dari dua lembar kaca atau lebih, berupa kaca pengaman berlapis atau laminated glass, yang menjadi struktur lantai jembatan.

Sistem perekatan jembatan kaca ini pun menggunakan satu atau lebih lapisan laminasi atau interlayer dengan ketebalan total mencapai 25,55 mm.

Struktur jembatan ini juga dilengkapi double protection steel berupa baja galvanis yang dilapisi cat epoxy agar lebih tahan terhadap karat.

Rencananya, jembatan kaca ini akan diresmikan pada Oktober 2023. Untuk diketahui juga, jembatan ini hanya mampu menampung 100 orang dengan total beban 9 ton.

Sehingga pengunjung harus bergantian untuk bisa menikmati sensasi jembatan kaca. Pihak pengelola pun mengedepankan keamanan wisatawan yang datang (Bisnis)

Jembatan Kaca Bromo SERUNI POINT

Anak Buah Polah (dari hal 1)

SEBANYAK 13.885 (43,13 persen) pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa dipecat tidak hormat karena belum melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ditelusuri dari laman elhkpn.kpk.go.id, terdapat 32.191 pegawai Kemenkeu yang menjadi wajib lapor. Namun, baru 18.306 (56,87 persen) yang sudah melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2023.

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2021 Pasal 4, PNS wajib melaporkan harta kekayaannya. "PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," demikian bunyi Pasal 4 huruf e pada Permen tersebut.

PNS yang tidak mengikuti ketentuan tersebut bisa mendapat hukuman disiplin, mulai dari sedang hingga berat. PNS yang wajib melaporkan harta kekayaannya adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional dan PNS lain yang menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan.

Jika PNS pejabat fungsional tidak melaporkan harta kekayaan, maka ia bisa dijatuhi hukuman disiplin sedang, berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama enam hingga 12 bulan.

Sementara, bagi PNS lain yang menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan, tetapi tidak melaporkan bisa mendapat hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah selama 12 bulan; pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya buka suara tentang 13 ribu lebih pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang belum menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurutnya, Kemenkeu mempunyai sistem untuk mengawasi detail hal tersebut.

"Pak Irjen atau Pak Yustinus Prastowo (staf khusus menkeu) akan menjelaskan mengenai kepatuhan tersebut. Ada sistem dan dimonitor detail di Kemenkeu," katanya Kamis (23/2/2023).

Ia menjelaskan di lingkungan Kemenkeu tidak semua pegawai diwajibkan lapor LHKPN. Hanya pegawai dan pejabat yang sudah ditetapkan dalam KMK 83/2021 mengenai Daftar Wajib Lapor di Lingkungan Kemenkeu. Adapun jumlah wajib lapor sekitar 30 ribu hingga 33 ribu pegawai. Jumlah itu mencakup JPT Madya (eselon I), Pratama (eselon II), dan staf khusus.

Kemudian, para pejabat pengadaan dan bendahara, pemeriksa bea cukai, AR, penilai pajak, pemeriksa pajak, pelepas, widyaiswara, hakim pengadilan pajak, serta pejabat eselon III dan IV serta pelaksana di unit

tertentu.

Adapun pegawai lainnya yang tidak diwajibkan melaporkan LHKPN, tetap melaporkan harta kekayaannya melalui Aplikasi Laporan Pajak dan Harta Kekayaan (Alpha), suatu aplikasi pelaporan di internal Kemenkeu.

Ia pun mengklaim mulai 2017 hingga 2020 tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN di Kemenkeu mencapai 100 persen. Adapun pada 2021, terdapat satu orang yang telah melaporkan LHKPN pada periode pelaporan Januari-Maret 2022 namun sampai dengan akhir Desember tidak melengkapi dokumen Surat Kuasa.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan saat ini proses pelaporan tengah berjalan dan pengawasan terus dilakukan agar semua pejabat di lingkungan Kemenkeu yang wajib lapor, menyampaikan jumlah harta kekayaan yang dimiliki. "Setiap tahun yang wajib lapor kita pantau dan diawasi. Kemenkeu termasuk sangat patuh," ujarnya.

Suhasil menyebutkan untuk saat ini masih ada waktu beberapa bulan bagi pejabat Kemenkeu untuk melaporkan harta kekayaannya. Sebab, batas pelaporan sampai akhir Maret 2023. "Untuk LHKPN 2022 deadline-nya sampai Maret besok," imbuhnya.

Sementara, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyebutkan meski batas pelaporan di akhir Maret, tapi Kemenkeu selalu mengimbau pejabatnya untuk lapor harta lebih cepat. "Iya (sampai akhir Maret), tapi Kemenkeu punya kebijakan mendorong akhir Februari. Jadi untuk melapor lebih awal sebagai komitmen Kemenkeu tentang transparansi dan akuntabilitas. Jadi ini kebijakan internal," jelasnya.

Selain itu, semua pejabat di lingkungan Kemenkeu memiliki sistem pelaporan sendiri yakni Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (ALPHA) untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan. "Jadi ini sistem pencegahan yang sudah cukup kuat disiapkan," pungkasnya.

Rafael Bakal Diperiksa

Sebelumnya, gaya hidup mewah para pejabat Kemenkeu menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap David yang merupakan anak dari pengurus Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor Jonathan Latumahina.

Pelaku bernama Mario Dandy Satrio. Dia merupakan anak dari pejabat eselon III yang menduduki posisi Kepala bagian (Kabag) Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan II. Dari kasus itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan. Rafael memiliki harta kekayaan senilai total Rp56 miliar. Jumlah ini empat kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo yang hanya sebesar Rp14 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengundangi Rafael untuk mengklarifikasi terkait hal



Menteri Yaqut Cholil Qoumas menengok David yang koma diduga dianiaya anak pejabat pajak. (Foto Dok. Instagram @gusyauqut)

itu. "Klarifikasi. Nanti lihat hasilnya saja kalau diklarifikasi, Nanti kita kasih tahu kalau klarifikasi," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jaksel, Kamis (23/2/2023).

Pahala menerangkan saat ini Tim Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK sudah bergerak untuk memeriksa seluruh harta kekayaan Rafael. Pahala menerangkan pihaknya akan melihat sumber kekayaannya terlebih dahulu. "Sudah bergerak (Tim LHKPN), gue udah suruh periksa," kata Pahala.

"Jadi yang pertama kita lihat dulu nih sumbernya, ya kan, warisan, jang-an-rekeningnya ada lagi yang lain itu pemeriksaan standarlah," imbuhnya.

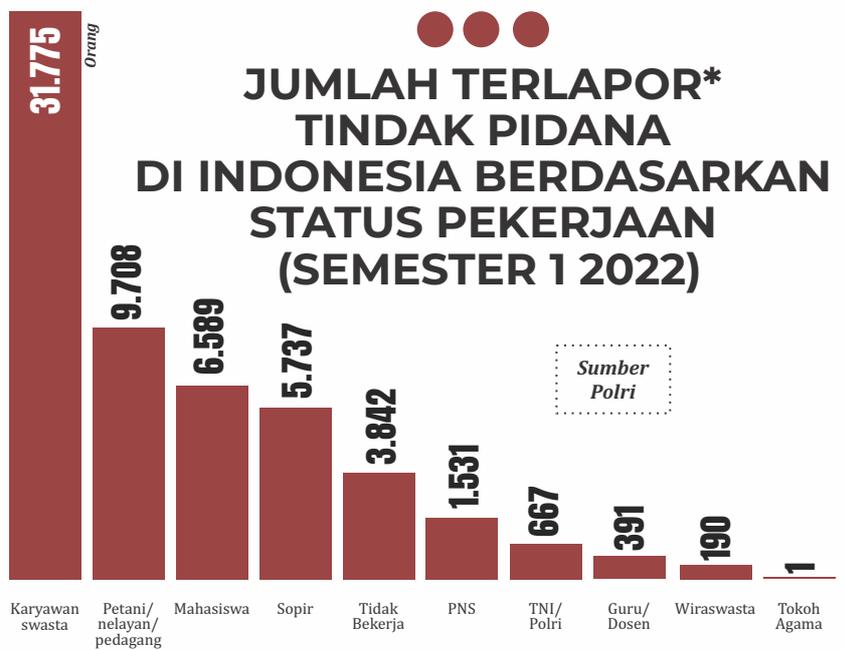
Pahala menjabarkan pihaknya bekerja sama dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk mencari tahu apakah ada aset lain yang belum dilaporkan oleh Rafael. KPK, kata Pahala, juga akan memeriksa rekening bank hingga asuransi. "Jadi yang pertama target kita, mencari tahu ada lagi tidak

aset dia yang tidak dilapor, makanya kita ke BPN. Kalau lihat aset lain, kita ke bank kalau ada rekening bank dia yang belum dilapor dan belum ada isinya, kita ke asosiasi asuransi kali-kali dia punya polis yang miliaran dia tidak lapor," kata Pahala.

"Kita ke bursa efek kali-kali dia punya saham atau obligasi atau apa pun yang tidak dilapor itu yang pertama yang kita lakukan," kata Pahala.

Tak hanya itu, kata Pahala, KPK juga akan mencari tahu asal muasal harta Rafael apakah dari warisan atau hibah tanpa akta. Bila harta itu berasal dari hibah tanpa akta, KPK akan mengklarifikasinya juga. "Yang kedua, yang ada ini asalnya dari mana, kalau warisan kita agak tenang kalau kita cek bahwa memang aslinya orang tuanya punya harta banyak misalnya gitu," kata Pahala.

"Tapi kalau dia bilang hibah tidak pakai akta, itu sudah pasti kita undang. Jadi kalau ntar kita undang ada dua yang belum dilapor, sama yang akta tidak pakai hibah dari siapa nih hubunganannya apa," imbuhnya (wid,rls,kum,ant,dtc/dya).





DPRD DUKUNG PEMKOT WUJUDKAN SURABAYA KOTA LAYAK ANAK LEVEL DUNIA



DPRD meminta Pemkot Surabaya memperbanyak fasilitas yang dibutuhkan anak seperti tempat bermain untuk mewujudkan KLA kelas dunia.

SURABAYA - Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Dunia atau CFCI (Child Friendly Cities Initiatives) terus digeber. Mulai dari memastikan payung hukum yang kuat tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak secara konsisten. Hingga melibatkan anak secara aktif dalam berbagai isu tentang anak, sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan.

Upaya inipun mendapat apresiasi dan dukungan dari DPRD Surabaya. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah memberi masukan agar target tersebut dapat terealisasi dengan tepat, Pemkot diharapkan menambah fasilitas penopang. "Saya ingin menambahkan, kalau ingin menjadi KLA dunia, harus ada wahana yang menarik untuk anak, tempat dan sarana prasarana bermain mereka yang memadai," ucap Laila, Kamis (23/2/2023).

Menurut legislator asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, menjadi KLA dunia merupakan tugas berat. Sebab, baik pemerintah maupun warganya harus kompak saling menjaga anak-anak saat bermain ataupun belajar di lingkungan masing-masing.

"Anak-anak fasanya bermain ya harus bermain, fasanya belajar ya harus belajar. Baru nanti ketika dia menginjak remaja, dewasa, mereka diajari bagaimana berkegiatan yang bisa menghasilkan keuntungan buat dirinya," ujarnya.

Selain menambah fasilitas penunjang publik, lanjut Laila, Pemkot Surabaya juga harus memastikan tak ada lagi kasus-kasus kekerasan anak, baik secara fisik ataupun psikis. "Fenome mengemis dan mempekerjakan atau mengajak anak bekerja anak-anak harus segera ditindak, tidak boleh itu," imbuhnya.

Jika dua hal itu bisa terealisasi, Laila optimistis KLA kelas dunia yang menjadi target bisa segera terverifikasi tahun ini. "Saya optimistis, Surabaya mampu mendapat predikat KLA berkelas dunia. Tinggal bagaimana nanti Pemkot mensosialisasikan kepada warga pentingnya menjaga tumbuh kembang anak disetiap lingkungan masing-masing," pungkas Laila.

Untuk diketahui, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, demi mewujudkan daerah itu menjadi Kota Layak Anak Dunia. Upaya itu menyusul setelah lima tahun berturut-turut Surabaya meraih

penghargaan Kota Layak Anak (KLA) di tingkat Nasional untuk Kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Kota Pahlawan dinilai layak mendapatkan predikat itu dan dinilai layak sejajar dengan kota-kota besar di dunia dalam hal memberikan kenyamanan, keamanan, dan pemenuhan hak kepada anak. Surabaya menuju Kota Layak Anak tingkat dunia itu diinisiasi oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dengan mengirimkan surat kepada Unicef Indonesia pada 13 Desember 2022.

Dalam surat tersebut, Wali Kota Eri mengajukan diri untuk menjadikan Surabaya sebagai anggota CFCI, sebuah forum atau jaringan khusus di dunia yang fokus pada kota layak anak tingkat internasional atau dunia. Unicef Indonesia pun siap mendukung Surabaya menjadi anggota CFCI.

Keinginan dan komitmen Pemkot Surabaya disambut dengan sangat baik oleh Unicef perwakilan Jawa dan Indonesia. Bahkan, mereka juga menilai komitmen Pemkot dan DPRD Surabaya sangat luar biasa untuk menjadikan Surabaya Kota Layak Anak tingkat dunia.

Pemkot Surabaya menegaskan tujuan utama mengajukan Surabaya sebagai anggota CFCI bukan hanya sekadar predikat. Lebih dari itu untuk menjaga kota itu bagi tumbung kembang anak-anak Surabaya dengan nyaman di kemudian hari. Mereka harus merasa aman dan nyaman berada di kotanya sendiri.

Saat ini, Pemkot bersama DPRD Surabaya juga terus mengebut perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak, sehingga semua sektor harus ramah anak. Pemkot juga sudah membentuk Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Surabaya, Jurnalis Sahabat Anak Kota Surabaya, dan juga Forum Anak Surabaya yang juga ikut berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang).

Selain itu, Pemkot juga sudah membentuk Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dan penyediaan Sekretariat Forum Anak Surabaya (FAS). Bahkan, ada pula Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang merupakan layanan satu pintu mengenai masalah anak dan keluarga.

Ada juga Rumah Anak Prestasi yang menjadi rumah kreativitas anak-anak disabilitas, Pondok Kalijudan dan Kampung Anak Negeri. Pemkot juga sudah menyebar Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di berbagai penjuru kota.

Begitu juga ada Kampung Belajar, Kampung Sehat, Kampung Aman, Kampung Asuh, Kampung Kreatif

Inovatif, Kampung Bebas Rokok dan Narkoba, Wisata Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak dan taman kota ramah anak disabilitas. Pemkot juga memfasilitasi anak-anak dengan Bus Sekolah, bantuan seragam sekolah, hingga beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga terus menekan angka stunting, dari yang awalnya 6.722 balita di tahun 2021, akhirnya tinggal 923 balita di tahun 2022. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) juga terus menurun.

Surabaya juga sudah menjadi barometer PAUD Holistik Integratif tingkat nasional. Berbagai kegiatan Bunda PAUD pun banyak digelar. Ada pula pemberian bantuan makanan atau permakanan tambahan kepada siswa PPT dan pos PAUD serta berbagai program lainnya.

Capacity Building Satgas PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan Relawan, di mana terdapat 926 relawan yang tersebar di 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan di seluruh Kota Surabaya, dan fasilitasi dan pembinaan Forum Anak (FA) Tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.

Penyelenggaraan KAS RPA (Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak), serta Pembentukan Duta Trantibum (Ketentraman dan Ketertiban Umum) di kalangan pelajar, yang bertugas mereduksi potensi kenakalan remaja di lingkungan sekolah.

"UNICEF mengaku bahwa Surabaya sangat luar biasa dengan kemampuan dan komitmen Pemkot Surabaya bersama DPRD, itu yang membuat mereka senang. Serta yakin bahwa Surabaya bisa menjadi kota ramah anak. Setelah ini mereka akan mendampingi Kota Surabaya menjadi kota rujukan, ini adalah langkah pertama Surabaya menuju Kota Layak Anak Tingkat Dunia," ungkap Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beberapa waktu lalu. (ADV,mira/dya)



LAILA MUFIDAH
Wakil Ketua DPRD Surabaya